

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu negara Indonesia harus memperhatikan salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu pembangunan daerah karena pada hakekatnya pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari pembangunan daerah, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan daerah adalah wujud dari keberhasilan pembangunan nasional.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu bahwa suatu daerah berkewajiban menggali sumber keuangannya sendiri agar daerah tersebut dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah daerah diharapkan lebih efektif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri dan mengelolanya secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab ditujukan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan sudah lama dicanangkan, dan kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih

otonom tanpa mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya.

Berdasarkan dengan UU No.22 tahun 1999 bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri atas:
 - a. Bagian daerah dari penerima PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan sumbangan cukup besar bagi penerimaan daerah dibandingkan dengan komponen lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah dipungut hanya bila masyarakat menggunakan barang atau fasilitas milik negara. Salah satu bentuk pungutan yang di berlakukan

oleh Pemerintah Daerah guna mencukupi kebutuhan bagi Pembangunan Daerah adalah Pungutan Retribusi Daerah. Mengenai Profil PAD Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1.
Target Dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2002/2003

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi
1. Bagian Pendapatan Asli Daerah	49.685.313.410	56.391.374.292
a. Pos Pajak Daerah	27.107.396.233	30.517.591.845
b. Pos Retribusi Daerah	13.991.791.110	14.193.457.159
c. Pos Bagian Laba BUMD	2.509.234.852	2.509.234.852
d. Pos Lain-lain PAD yang sah	6.076.891.214	9.171.090.435
2. Dana Perimbangan	185.333.797.889	187.968.763.862
a. Pos Bagi Hasil Pajak	21.985.125.317	24.744.094.790
b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	808.672.572	350.156.572
c. Pos Dana Alokasi Umum	162.540.000.000	162.874.512.500
d. Pos Dana Alokasi Khusus	-	-
e. Pos Penerimaan Lainnya	-	-
3. Bagian Pinjaman Daerah	-	-
a. Pos Pinjaman Luar Negeri	-	-
b. Pos Pinjaman Dalam Negeri	-	-
4. Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	17.459.217.745	22.540.340.877
a. Pos Penerimaan dari Pemerintah	5.096.788.000	5.498.801.550
b. Pos Penerimaan dari Propinsi	12.362.429.745	17.041.539.327
c. Pos Urusan Kas dan Perhitungan	948.868.385	16.276.511.359

Sumber Data: BPKD Kota Yogyakarta

Di dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang. Pada tahun anggaran 2002

mengalami peningkatan pencapaian realisasi PAD mencapai 56.391 juta rupiah, meningkat 39,71% dari PAD tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 40.353 juta rupiah. Surplus tahun 2002 sudah dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan.

Pengelolaan / pengurusan keuangan daerah belum optimal dilaksanakan adalah:

1. Kelembagaan dan aparat yang mengurus keuangan daerah belum optimal dan profesional.
2. Potensi daerah belum seluruhnya dapat digali.
3. Hubungan kemitraan dengan Badan Usaha belum banyak dilakukan.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.
Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2002

No	Jenis-jenis Retribusi	Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	331.634.740	374.643.970
2	Pelayanan Persampahan/Kebersiha	438.921.850	433.235.550
3	Pengganti Biaya Cetak KTP & Akte Capil	564.119.000	590.412.5000
4	Pelayanan Pemakamam & Pengabuan Mayat	33.350.000	32.835.500
5	Parkir di Tepi Jalan Umum	645.000.000	586.297.630
6	Pasar	3.826.027.295	3.916.504.949
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	372.675.800	419.258.769
8	Pemakaian Kekayaan Daerah	54.965.000	50.664.400
9	Terminal	1.409.017.075	1.515.852.975
10	Tempat Penginapan//Villa	1.173.600	1.041.000
11	Rumah Potong Hewan	308.651.250	280.557.100
12	Pengolahan Limbah Air	92.156.000	92.876.500
13	Penjualan Produksi Usaha Daerah	43.313.650	45.505.850

14	Ijin Mendirikan Bangunan	750.000.000	854.581.400
15	Ijin Gangguan	383.851.000	398.603.100
16	Pelayanan RSUD	4.461.500.000	4.300.579.840
17	Pasar Hewan	35.066.350	33.142.175
18	Perijinan Angkutan	50.000.000	73.475.000
19	Usaha Kepariwisataa	21.872.000	22.255.000

Sumber Data: BPKD Kota Yogyakarta

Dapat dilihat pada tabel 1.2. diatas jenis-jenis retribusi daerah yang paling besar memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pelayanan RSUD.

Retribusi Parkir cukup besar memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat di lihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Target Parkir	Realisasi Parkir
1998/1999	551.016.500	557.541.800
1999/2000	506.702.720	515.019.100
2000/2001	396.870.350	414.313.150
2001/2002	580.000.000	889.158.800
2002	645.000.000	586.297.630

Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta

Dilihat tabel 1.3. diatas bahwa realisasi parkir dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 mengalami peningkatan, karna jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta yang dari tahun ke tahun meningkat pesat, dimana kendaraan pribadi/non angkutan umum mempunyai

kecendrungan meningkat lebih tinggi dari pada kendaraan angkutan umum, sehingga penerimaan dari retribusi parkir berpotensi untuk terus digali.

Pada tahun anggaran 2002 mengalami penurunan dari penetapan target retribusi parkir di Kota Yogyakarta, salah satu kendala di lapangan adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir karna menggunakan kupon parkir berkali-kali yang sudah kadaluarsa (yang sudah dirobek dari segel kupon parkir) dengan maksud penerimaan dari parkir lebih banyak ke pribadi di bandingkan ke pengelola parkir (menurut Kepala UPTD), kendala ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

.Penggunaan retribusi parkir ini berlaku untuk setiap kali parkir dan ini berarti keuntungan yang potensial bagi Propinsi DIY dan khususnya Kota Yogyakarta. Dengan latar belakang cukup pentingnya retribusi daerah dalam sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah serta untuk mengetahui kontribusi pemuungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber dari retribusi daerah maka penulis bermaksud mengangkat judul " **PERANAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA** " sebagai bahan penulisan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta?
2. Seberapa besar elastisitas retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta ?

3. Bagaimanakah tingkat efektifitas pungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana tingkat efisiensi pungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta?

1.3. Batasan Masalah

Dari berbagai macam-macam retribusi yang ada, penulis hanya akan membahas dan menulis dari retribusi parkir di Kota Yogyakarta, yaitu bagaimana kontribusi, elastisitas, efektifitas, dan efisiensi pungutan retribusi parkir terhadap PAD. Karena keterbatasan kemampuan dan data yang ada maka penulis membatasi hanya dalam kurun waktu 1998 sampai 2002 yang terdapat di Kota Yogyakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana retribusi memberikan nilai tambah bagi PAD.
2. Untuk menganalisis seberapa besar elastisitas retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pengelolaan Parkir Kota Yogyakarta dalam mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi masalah retribusi parkir serta mendayagunakan potensi yang ada semaksimal mungkin sehingga pendapatan daerah dapat ditingkatkan.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai retribusi parkir khususnya retribusi parkir Kota Yogyakarta.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang penduduk dan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan Kota Yogyakarta dibidang ekonomi, visi, misi dan strategi pembangunan Kota Yogyakarta.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB IV LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, terutama tentang retribusi parkir.

BAB V METODELOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang materi, alat analisis, variabel, dan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang perhitungan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, elastisitas, efektifitas, dan efisiensi di Kota Yogyakarta .

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis data dan memberikan saran yang membangaun.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

2.1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 %) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 %) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990 – 2000 sebesar -0,37 persen.

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk tahun 2002 tercatat 510.914 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 51,56 persen laki-laki dan 48,44 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih besar dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 15.720 jiwa per km².

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga juga bertambah dari 101.117 rumah tangga pada tahun 2001 menjadi 102.267 rumah tangga pada tahun 2002 rata-rata anggota rumah tangga 5 orang. Persentase penduduk WNI adalah 99,88 persen dan WNA 0,12 persen, pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta
Hasil Sensus dan SUPAS
1971 – 2000

Tahun (Year)	Jumlah Penduduk (Jiwa / Lives)	Kepadatan/Density (Jiwa / Km ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1971	340.908	10.489	0.90
1980	398.192	12.252	1.72
1990	412.059	12.679	0.35
1995*)	418.944	12.891	0.33
2000	397.398	12.228	-0.37

Sumber Data: BPS Kota Yogyakarta

Pembagian wilayah di daerah Kota Yogyakarta menurut kecamatan dan luas wilayah yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan dan Luas
Di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Mantrijeron	2,61
Kraton	1,40
Mergangsan	2,31
Umbulharjo	8,21
Kotagede	3,07
Gondokusuman	3,99
Danurejan	1,10
Pakualaman	0,63
Gondomanan	1,12
Ngampilan	0,82
Wirobrajan	1,76
Gedongtengen	0,96
Jetis	1,70
Tegalrejo	2,91

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 2.2. diatas bahwa kecamatan yang paling besar menurut luas wilayah adalah Kecamatan Umbulharjo dan yang paling kecil luas wilayah yakni Kecamatan Pakualaman.

2.2. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2002 tercatat 10.029 orang, yang terdiri dari 87,01 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,99 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,38 persen, golongan II 25,27 persen, golongan III 52,23 persen dan sisanya golongan IV 20,12 persen.

Jumlah Pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2002 sebanyak 4.035 orang yang terdiri dari 2.123 laki-laki dan 1.192 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 46,74 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (42,01 persen), Diploma (9,62 persen) dan sisanya berpendidikan SMTP dan SD.

2.3. Transportasi

Tersedianya prasarana/infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/infrastuktur yang pokok adalah jalan, makin meningkatnya usaha

pembangunan menuntut pula pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Panjang jalan diseluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2002 mencapai 478.662 km dengan rincian: 323.840 km yang sudah diaspal, 8.202 km jalan tanah,dan 146.620 km jalan di perkeras. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 3.733 km berada dibawah kewenangan Provinsi D.I. Yogyakarta dan 456.797 km berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta. Kondisi jalan secara umum dapat di katakana layak untuk dilalui, 20,75% kondisi jalan baik,70,97% kondisi jalan sedang,dan 8,28% kondisi jalan rusak.

Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2002, jumlah kendaraan umum bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 7.563 unit. Komposisinya pada tahun 2002 terdiri atas: 8,29% mobil penumpang umum, 57,87% pick up, 23,91% truk, 9,93% kendaraan bis.

Angkutan kereta api yang ada di Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu yang khusus di peruntukan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif, dan stasiun Lempuyangan yang di peruntukan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta

Dalam era otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan dan daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Ciri dan karakteristik Perekonomian Kota Yogyakarta didalam pembentukan Produk Domestik Bruto selalu di dominasi oleh sektor jasa. Sedangkan untuk urutan kedua diduduki oleh perdagangan, hotel dan restoran namun peranannya cukup besar karena menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menduduki urutan ketiga. Ketiga sektor inilah yang sangat berpengaruh didalam pembentukan PDRB yang setiap tahun selalu meningkat pertumbuhannya (pernah mencapai sebesar 4,75% sebelum terjadi krisis ekonomi). Namun dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 berpengaruh terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDRB di Kota Yogyakarta yang mengakibatkan mengalami penurunan sampai dibawah 0%. Pada tahun 1998 mencapai -11,11%. Pertumbuhan PDRB tahun 1999 mencapai 1,03% dan pada tahun 2000 telah mencapai 3,6%, meskipun demikian secara umum kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta belum sebaik/ kembali seperti pada tahun sebelum terjadi krisis ekonomi

Salah satu dari pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan / pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari berapa pos yang terdiri dari (Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta):

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- b. Pendapatan Asli Daerah.
- c. Sumbangan Pemerintah Atasan / Dana Perimbangan.
- d. Pinjaman Daerah
- e. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sebagai gambaran penerimaan/pendapatan daerah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 sebagai mana tersebut pada tabel 2.3. dibawah ini:

Tabel 2.3.
Penerimaan/ Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001

No	Pos Penerimaan/ Pendapatan	1997	1998	1999	2000 (9 bln)	2001
1	Pendapatan Asli Daerah:					
	a. Hasil Pajak Daerah	10.335.741.802	10.226.547.924	13.668.831.229	12.025.309.337	22.886.374.632
	b. Hasil Retribusi Daerah	7.702.055.959	7.625.362.180	7.978.502.606	7.126.576.820	11.773.895.343
	c. Laba PMD	612.327.151	879.374.865	1.116.628.134	1.926.370.39	2.249.570.025
	d. Lain-lain Pendapatan yang sah	504.525.456	1.201.610.822	2.006.166.213	1.374.695.657	3.442.752.889
		18.154.650.370	19.972.895.793	24.790.128.183	22.452.952.250	40.352.592.890
2	Dana Perimbangan					
	a. Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	8.081.438.399	8.680.145.698	10.574.498.547	12.290.938.009	-
	b. Bagian Sumbangan	24.284.198.476	39.719.361.869	55.097.232.636	48.257.958.812	-
	c. Bantuan Penerimaan/Pemba ngunan	739.185.630	-	-	-	-
	d. DAU Dan DP	-	-	-	-	167.269.506.353
		33.104.822.505	48.399.507.567	65.671.731.183	60.548.896.821	167.269.506.353
3	Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah					
	Jumlah 1,2 dan 3	52.259.472.875	68.372.403.361	90.461.859.366	83.001.849.072	203.486.495
						207.625.585.738

Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta

Catatan: Tanpa memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Dari tabel diatas bahwa penerimaan pendapatan secara umum meningkat dari tahun ke tahun berkisar antara 8% sampai 12%, kecuali pada tahun 1998/1999 menurun dari penerimaan/pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun anggaran 2002 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 56,377 juta rupiah, meningkat 39,71 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 40.353 juta rupiah. Surplus tahun 2002 sudah dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan yang besarnya 33.998 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total pengeluaran belanja daerah, baik untuk keperluan belanja rutin maupun belanja pembangunan, kontribusinya hanya 25,08 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan daerah masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah tidak semua pos penerimaan di prediksi:

a. Pos Penerimaan Yang Tidak di Prediksi

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, karena sebagian besar dari proyek yang di luncurkan, sisi lain berusaha menghindari terjadinya proyek luncuran.
2. Pinjaman daerah, sangat tergantung dari kebutuhan daerah untuk dana pembangunan dari pos penerimaan/pendapatan daerah atau dari pinjaman.

b. Pos Penerimaan yang diprediksi

1. Pos Pendapatan Asli Daerah
2. Sumbagan Pemerintah Pusat/Dan Perimbangan (DP)
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah dengan pertimbangan kenaikan penerimaan/pendapatan pengembangan pemanfaatan asset daerah, penggalan potensi daerah beban Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah (desentralisasi).

2.5. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Yogyakarta

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara terpadu serasi, berkelanjutan serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan komitmen bersama antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha/swasta perlu didukung adanya prakarsa sendiri dan aspirasi/peran aktif masyarakat serta dunia usaha dan termasuk pendayagunaan pengawasan dan koordinasi pembangunan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan daerah. Kerjasama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan kawasan perlu terus ditingkatkan agar kawasan-kawasan dapat tumbuh secara serasi dan mampu

memecahkan masalah-masalah pada wilayah sesuai dengan arah kebijakan pengembangannya.

Dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan mewujudkan visi, misi, Kota Yogyakarta perlu ditetapkan strategi kebijakan ekonomi antara lain:

1. Menyediakan dan mengembangkan komoditas unggulan yang kompetitif di bidang jasa, perdagangan dan pariwisata.
2. Membuka dan mengembangkan aksesibilitas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor yang mendominasi terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDRB.
3. Mengembangkan pusat-pusat distribusi jasa, perdagangan dan pariwisata.
4. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.
6. Mengembangkan keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang industri, perdagangan, jasa dan investasi dengan

membuka aksesibilitas yang sama terhadap peluang kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta.

7. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong inovasi-inovasi munculnya produk unggulan di bidang jasa dan perdagangan dalam memenuhi perkembangan pasar.
8. Menata Badan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan dan profesional serta mengembangkan sesuai potensi yang ada

2.6. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Yogyakarta

2.6.1. Visi

Untuk mewujudkan visi dalam Pola Dasar Pembangunan Tahun 2002-2006 serta kondisi, potensi, peluang dan kendala yang dihadapi disusun Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang:

“ Terwujudnya Pembangunan Kota Yogyakarta dalam rangka meletakkan kerangka dasar menuju Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Kota Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang didukung Pemerintah yang Baik dan Bersih.”

2.6.2. Misi

Untuk mencapai Visi yang ditetapkan maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas didukung oleh masyarakat, dunia usaha (swasta) dan pemerintah, yang berilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju Kota Pariwisata yang berbudaya didasarkan pada pengembangan budaya, seni dan wisata.
3. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima didasarkan pada pengembangan jasa-jasa yang dapat memberikan pelayanan pada kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
4. Menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
5. Memajukan warga masyarakat dalam setiap aspek kehidupan.
6. Melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki.
7. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, menanamkan sikap jujur dan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme pada aparatur serta dijiwai semangat pelayanan pengabdian pada masyarakat.
9. Mengoptimalkan kebersamaan seluruh pelaku pembangunan antara Pemerintah Daerah, Aparatur Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh komponen masyarakat yang didukung dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

2.6.3. Strategi Pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan suatu strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem pendidikan yang memadai.
2. Melestarikan dan mengembangkan obyek wisata, seni, budaya dan daya tarik wisata serta keterpaduan pengelolaan dengan melibatkan seluruh pelaku pariwisata.
3. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual dan etika bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertunpu pada mekanisme dan keunggulan konpetitif dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap peluang kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta.
5. Mengembangkan budaya hukum untuk menciptakan pemahaman, kesadaran, ketaatan dan penegakan hukum dalam seluruh aspek kehidupan.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan Aparatur Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang ada dan kinerjanya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pengelola pembangunan dan pelayan masyarakat.

7. Meningkatkan dan mendorong peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, derajat kesehatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, sistem partisipasi aktif dan suasana demokratis yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan untuk terciptanya masyarakat madani.
9. Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan keadilan dan kemakmuran.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya dan mempercepat pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana dan prasarana kota dan mampu menyusun jaringan kerja (*net work*) pengelolaan kawasan perkotaan (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta).
11. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan.
12. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan aparat dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan pemanfaatan aset daerah serta penggalan potensi daerah dalam rangka memberikan kontribusi pendapatan daerah.

BAB III
KAJIAN PUSTAKA

3.1. Penelitian Erick Marselin P

Penelitian mengenai peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir didalam meningkatkan PAD maka menggunakan rumus kontribusi yang merupakan rasio antara jumlah retribusi parkir dengan PAD dikali 100%. Besarnya kontribusi retribusi parkir untuk tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 – 1998/1999
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Kontribusi (%)
1989/1990	0,77
1990/1991	0,73
1991/1992	0,63
1992/1993	0,83
1993/1994	0,68
1994/1995	0,61
1995/1996	0,61
1996/1997	0,49
1997/1998	0,35
1998/1999	0,22
Jumlah	5,92
Rata – Rata	0,59

Sumber: Penelitian Erick Marselin P; “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Dari tabel 3.1. diatas dapat diketahui kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD, selama tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 memberikan kontribusi antara 0,22% sampai dengan 0,83%.

Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1992/1993 sebesar 0,83% dan terendah pada tahun anggaran 1998/1999 dengan kontribusi 0,22%, sehingga rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap PAD selama sepuluh tahun anggaran sebesar 0,59%.

Dari persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD pada tahun anggaran 1989/1990 sampai tahun 1992/1993 menunjukkan nilai kontribusi di atas rata-rata. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran tersebut diadakan pembukaan lahan baru untuk tempat parkir di tepi jalan umum dan pemungutan retribusi lebih diintensifkan sehingga penerimaan retribusi parkir menjadi lebih meningkat.

Persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD pada tahun anggaran 1993/1994 sampai tahun anggaran 1998/1999 menunjukkan kontribusi dibawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan jalan raya di Kabupaten Banyumas, pembuatan trotoar, pembuatan gorong-gorong di tepi toko dan jalan umum sehingga lahan parkir menjadi sempit. Hal ini menyebabkan persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD mengalami hambatan dan penurunan, sehingga mencapai titik terendah pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 0,22%.

Secara rata-rata retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,59% per tahun, yang berarti retribusi parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 0,59% dari total penerimaan PAD di Kabupaten Banyumas.

Untuk melihat lebih lanjut seberapa besar elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah perlu diketahui penerimaan retribusi parkir terhadap PAD. Disini terlihat ketidakpekaan penerimaan retribusi parkir

terhadap PAD, adapun hasil perhitungan elastisitas retribusi parkir dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Elastisitas Retribusi Parkir Terhadap PAD
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Elastisitas (%)
1989/1990	0,43
1990/1991	1,23
1991/1992	2,20
1992/1993	0,46
1993/1994	-16,02
1994/1995	1,89
1995/1996	0,97
1996/1997	25,74
1997/1998	-45,18
1998/1999	-32,65
Jumlah	-4,37
Rata – Rata	-32,65

Sumber: Penelitian Erick Marselin P; “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Berdasarkan tabel 3.2. di atas dapat dilihat bahwa elastisitas tertinggi sebesar $-45,18\%$ dan elastisitas tersendah sebesar $0,43\%$. Selama sepuluh tahun, anggaran rata-rata nilai koefisien elastisitasnya menunjukkan angka lebih besar dari satu sehingga bersifat elastis yaitu sebesar $-3,26\%$, artinya apabila penerimaan retribusi retribusi parkir berubah sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar $-3,26\%$.

Pada tahun anggaran 1990/1991,1991/1992,1993/1994,1994/1995, 1996/1997,1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 elastisitas PAD terhadap penerimaan retribusi parkir lebih dari satu (elastis) berarti pada tahun anggaran tersebut relatif peka terhadap penerimaan PAD.

Kemudian pada tahun anggaran 1989/1990,1992/1993, dan 1995/1996 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD kurang dari satu (inelastis)

berarti penerimaan dari retribusi parkir relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD.

Persentase elastisitas retribusi parkir terhadap penerimaan PAD dibawah rata-rata atau karena peningkatan sumbangan retribusi parkir terhadap PAD yang lebih kecil dari pada peningkatan sumbangan sektor yang lain untuk PAD.

Untuk mengukur efektivitas retribusi parkir dilakukan dengan mengukur realisasi penerimaan retribusi parkir dengan besarnya target retribusi yang telah ditetapkan. Dengan anggapan wajib retribusi membayar kewajibannya masing-masing. Dari perhitungan efektivitas berarti semakin efektif penerimaan retribusi parkir, adapun hasil perhitungan efektivitas ini dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.
Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap PAD
Tahun Anggaran 1989/1990 – 1998/1999
(Dalam ribuan Rupiah)

Tahun	Efektivitas (%)
1989/1990	102,84
1990/1991	115,87
1991/1992	111,42
1992/1993	121,21
1993/1994	103,64
1994/1995	113,31
1995/1996	112,64
1996/1997	105,30
1997/1998	99,24
1998/1999	92,65
Jumlah	1.078,12
Rata-Rata	107,81

Sumber: Penelitian Erick Marselin P; “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Berdasarkan pada tabel 3.3. diatas menunjukkan tingkat efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dapat di

simpulkan selama sepuluh tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 dapat dikatakan efektif. Dimana pada tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 menunjukkan efektifitas lebih dari 100%. Keadaan ini menunjukkan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pemungutan telah bekerja secara efektif.

Pada tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 tingkat efektifitas menunjukkan angka di bawah 100%, yaitu masing-masing 94,24% dan 92,65% yang berarti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bekerja kurang efektif, sehingga rencana pencapaian target yang telah ditentukan tidak tercapai hal ini disebabkan karna penetapan target parkir yang tinggi dari tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 275.000.000,00- menjadi Rp 296.000.000,00- pada tahun anggaran 1997/1998, sehingga target sulit untuk dicapai disebabkan karna adanya perbaikan jalan raya Kabupaten Banyumas, pembuatan trotoar dan pembuatan gorong-gorong ditepian toko dan jalan umum sehingga lahan parkir menjadi sempit sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 ketidakefektifannya sebesar 92,65% dapat terjadi karna adanya perubahan Perda dengan diberlakukannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas No.69 Tahun 1998 menggantikan Keputusan Bupati No.17 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Untuk mengetahui lebih prospek penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun atau melihat naik turunnya penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya maka digunakan perhitungan trend dengan metode Least Square's dari data yang dapat dibuat pada tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4.
Trend Penerimaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 1989/1990 – 1998/1999

Tahun	Y	X	XY	X ²	Y ²
1989/1990	107.978,22	-9	-971.803,98	81	129.543,01
1990/1991	132.671,15	-7	-928.698,05	49	150.405,89
1991/1992	147.072,55	-5	-735.362,75	25	171.268,77
1992/1993	230.300,28	-3	-690.900,84	9	192.131,65
1993/1994	228.015,54	-1	-228.015,54	1	212.994,53
1994/1995	254.947,71	1	254.947,71	1	233.857,41
1995/1996	287.240,24	3	861.720,72	9	254.720,29
1996/1997	289.566,63	5	1.447.833,15	25	275.583,17
1997/1998	287.797,84	7	2.014.584,88	49	296.446,05
1998/1999	268.674,59	9	2.418.071,31	81	317.308,93
Jumlah	2.234.259,75	0	3.442.376,61	330	

Sumber: Penelitian Erick Marselin P; " Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD "

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai konstanta $a = 223.425,97$ dan nilai koefisien $b = 223.425,97 + 10.431,44 X$. Hal ini berarti koefisien b bertanda positif, maka terjadi kenaikan penerimaan retribusi parkir rata-rata sebesar 20862.88 persen per tahun. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dinilai berhasil dalam mengelola penerimaan retribusi parkir dengan baik, sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir untuk tahun yang akan datang dapat ditingkatkan.

Dari perhitungan trend diatas maka terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya pengelolaan dari Dipenda dan DLLAJ yang baik, sehingga memungkinkan untuk terus digali dan ditingkatkan realisasi penerimaan dari retribusi parkir di Kabupaten Banyumas.

3.2. Penelitian Indah Rosepita Dewi

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dan peranannya terhadap retribusi daerah di Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Indah Rosepita Dewi, untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah digunakan rumus kontribusi yang merupakan rasio antara jumlah realisasi retribusi parkir dengan jumlah realisasi retribusi daerah dan dikalikan 100%.

Besarnya nilai kontribusi menentukan seberapa besar peranan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah semakin besar nilai kontribusinya, maka semakin besar peranan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah.

Besarnya kontribusi parkir untuk tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah
Di Kabupaten Klaten Tahun 1990 – 2000

Tahun	Kontribusi (%)
1990	9,9
1991	10,27
1992	10,34
1993	11,9
1994	14,04
1995	11,63
1996	12,75
1997	8,35
1998	6,6
1999	12,1
2000	15,4
Rata – Rata	11,22

Sumber: Penelitian Indah Rosepita Dewi; “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir dan Peranan Terhadap Retribusi Daerah ”

Dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dari tahun 1990-2000, dimana retribusi parkir memberikan kontribusi antara 6,6% sampai dengan 15,4% terhadap retribusi daerah. Selain itu dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dari tahun 1990-2000 sebesar 11,22%. Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah tertinggi dicapai pada tahun 2000 sebesar 15,4%, dimana retribusi parkir mempunyai peranan yang besar terhadap retribusi daerah karna nilai kontribusinya diatas rata-rata, sedangkan nilai kontribusi terendah dicapai pada tahun 1998 sebesar 6,6%, dimana retribusi parkir memberikan peranan yang kurang terhadap retribusi daerah karna nilai kontribusinya dibawah rata-rata.

Pada tahun 1993-1996 menunjukkan nilai kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah diatas rata-rata, disebabkan karena adanya sistem baru dalam pemungutan retribusi parkir yaitu sistem berlangganan. Pada tahun 1997-1998 menunjukkan nilai kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dibawah rata-rata karna disebabkan mulai tahun 1997 tidak lagi diberlakukannya sistem berlangganan, selain itu dipengaruhi juga akibat dari krisis moneter. Sedangkan pada tahun 1990-2000 kontribusi retribusi parkir mulai meningkat lagi diatas rata-rata, hal ini disebabkan karena pengaruh dari otonomi daerah.

Untuk mengetahui efektifitas retribusi parkir dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan dikali 100%, dengan anggapan semua wajib

retribusi membayar kewajibannya masing-masing. Adapun hasil dari perhitungan efektifitas ini dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6.
Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir
Di Kabupaten Klaten Tahun 1990 – 2000

Tahun	Efektifitas (%)
1990	92,1
1991	104,8
1992	99,5
1993	101,7
1994	105,9
1995	103,4
1996	139,34
1997	89,5
1998	106,36
1999	99,6
2000	102,2
Rata-Rata	104,059

Sumber: Penelitian Indah Rosepita Dewi; “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir dan Peranan Terhadap Retribusi Daerah ”

Berdasarkan tabel 3.5. menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Klaten dari tahun 1990-2000 dapat dikatakan efektif, karna persentase rasio efektifitas meningkat dari tahun ke tahun walaupun relatif kecil. Dengan sistem berlangganan, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dari tahun 1993-1996 dapat dikatakan efektif, walaupun demikian sistem ini kemudian dihapus karena retribusi merasa tidak efisien meskipun sudah membayar retribusi parkir dengan cara berlangganan masih tetap membayar retribusi parkir pada saat parkir.

3.3. Penelitian Endah Setyaningsih

Dalam penelitian tentang peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang dilakukan oleh Endah Setyaningsih, Retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD Kotamadya Yogyakarta yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka apabila dalam perhitungan nilai K semakin besar atau >100%, maka menunjukkan peranan retribusi parkir terhadap PAD semakin besar.

Tabel 3.7.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1992/1993 – 1996/1997

Tahun	Kontribusi (%)
1992/1993	2,99
1993/1994	2,50
1994/1995	2,60
1995/1996	3,01
1996/1997	2,91
Rata –Rata	2,80

Sumber: Penelitian Endah Setyaningsih: “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Berdasarkan tabel 3.7. diatas dapat diketahui kontribusi parkir terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 1996/1997 walaupun dalam tingkat persentase yang kecil yaitu < 100% (menurut pendapat J. Supranto, dalam bukunya Statistik Teori dan Aplikasi hal 269), dengan rata-rata sebesar 2,80% per tahun.

Pada tahun 1992/1993 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD adalah sebesar 2,99%. Tahun 1993/1994 kontribusinya turun menjadi 2,50%, pada tahun 1994/1995 kontribusinya naik menjadi 2,60%. Sedangkan kontribusi pada tahun 1995/1996 naik cukup besar yaitu 3,01%. Namun pada tahun 1996/1997 kontribusinya turun menjadi 2,91%.

Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih besar atau >100% maka pengelolaan retribusi parkir dinilai efektif. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih kecil atau < 100% maka pengelolaan retribusi parkir dinilai tidak efektif.

Tabel 3.8.
Efektifitas Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1992/1993 – 1996/1997

Tahun	Efektifitas (%)
1992/1993	98,73
1993/1994	102,03
1994/1995	104,82
1995/1996	96,35
1996/1997	102,63
Rata-Rata	100,91

Sumber: Penelitian Endah Setyaningsih, “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas retribusi parkir rata-rata cukup efektif sebesar 100,91% per tahun (menurut pendapat Soetrisno, Ph dalam bukunya Perbandingan Sistem Ekonomi hal 2.5 – 2.6) sehingga Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam

mengelola penerimaan retribusi parkir dengan efektif. Ketidakefektifan terjadi pada tahun anggaran 1992/1993 yaitu sebesar 98,73% hal tersebut terjadi karena banyaknya jalan-jalan di perbaiki. Sedangkan pada tahun anggaran 1995/1996 ketidakefektifan sebesar 96,35% dapat terjadi karena adanya perubahan perda yaitu diberlakukannya Perda No.10 tahun 1994 menggantikan Perda No. 11 tahun 1983 tentang pengelolaan perparkiran di kota Yogyakarta yang intinya adalah perubahan tarif parkir. Sehingga hal tersebut butuh waktu untuk mensosialisasikan dan adaptasi terhadap perda baru tersebut, dan membutuhkan anggaran dalam mensosialisasikannya, efektifitas tinggi karena realisasi penerimaan retribusi parkir jika dibandingkan dengan target penerimaan retribusi parkir menunjukkan jumlah yang lebih besar.

Efisiensi retribusi parkir digunakan untuk menilai penerimaan retribusi parkir yang dipakai untuk menutup biaya pemungutan retribusi parkir tersebut. Dengan kata lain efisiensi retribusi parkir berhubungan dengan biaya yang diperlukan untuk memungut retribusi parkir. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih kecil atau $< 100\%$ maka pengelolaan retribusi parkir dinilai efisien.

Tabel 3.9.
Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1992/1993 – 1996/1997

Tahun	Efisiensi (%)
1992/1993	35,94
1993/1994	38,49
1994/1995	31,99
1995/1996	26,43
1996/1997	24,33
Rata-Rata	31,44

Sumber: Penelitian Endah Setyaningsih; “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.9. diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi retribusi parkir rata-rata cukup efisiensi sebesar 31,44% per tahun (menurut Pendapat Soetrisno, Ph dalam bukunya Perbandingan Sistem Ekonomi hal 2.5 – 2.6), maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam mengelola penerimaan retribusi parkir secara efisien. Tingkat efisiensi tersebut dari tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 secara umum meningkat dikarenakan penerimaan realisasi retribusi parkir mengalami kenaikan sehingga bisa menutup biaya pemungutan retribusi parkir.

Untuk mengetahui tingkat elastisitas atau kepekaan perubahan penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Apabila koefisien elastisitas ini lebih dari satu maka *elastis*, kalau sama dengan satu disebut *unitary elastis*, kalau kurang dari satu berarti *inelastis*.

Tabel 3.10.
Elastisitas Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1992/1993 – 1996/1997

Tahun	ERP (%)
1992/1993	-
1993/1994	0,27
1994/1995	1,20
1995/1996	2,24
1996/1997	0,83
Rata-Rata	1,13

Sumber: Penelitian Endah Setyaningsih; “ Peranan Retribusi Parkir terhadap PAD ”

Dari perhitungan elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD diatas menunjukkan bahwa angka elastisitas berkisar antara 0,27 sampai dengan 2,24 dan bila dilihat tingkat elastisitas retribusi parkir terhadap PAD rata-rata cukup elastis yaitu sebesar 1,13% (menurut pendapat DR. Boediono dalam bukunya Ekonomi Mikro hal 31) pada tahun 1993/1994 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,27 berarti kurang dari satu (inelastis) artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,27%.

Pada tahun 1994/1995 elastisitas retribusi parkir terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 0,93 yaitu dari 0,27 menjadi 1,20 berarti lebih dari satu atau elastis. Artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 1,20%.

Pada tahun 1995/1996 elastisitas retribusi parkir terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 1,04 yaitu dari 1,20 menjadi 2,24 berarti lebih dari satu atau elastis artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 2,24%.

Pada tahun 1996/1997 elastisitas retribusi parkir terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,41 yaitu dari 2,24 menjadi 0,83 berarti kurang dari satu atau inelastis artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,83%.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pendapatan Asli Daerah

4.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber dana yang pendapatannya untuk membiayai kelangsungan hidup daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerah

4.1.2. Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 79 Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan, bahwa undang-undang tersebut menjelaskan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelompokkan menjadi empat yaitu: (Rochmat Soemitro: 1983, hal 461)

1). **Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri:**

a. **Hasil Pajak Daerah**

Adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri sebagai

badan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung ditunjuk.

b. Retribusi daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

c. Hasil Perusahaan Daerah

Adalah penerimaan yang berasal dari perusahaan milik pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas publik dan sebagian keuntungan-keuntungan wajib disetor ke kas daerah.

d. Penerimaan Dari Dinas

Penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya pendapatan yang berasal dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan perikanan serta lain-lain.

e. Penerimaan lain-lain

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas, seperti penerimaan dari dinas-dinas daerah dan penerimaan dari persewaan tanah, rumah, gedung, kendaraan milik pemerintah daerah, menerima cicilan kendaraan roda empat.

2). Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3). Pinjaman Daerah

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
- b. Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri, harus mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4). Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Mengenai pendapatan lain-lain yang sah dapat ditegaskan bahwa yang termasuk golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai imbalan jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa milik pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan peraturan daerah yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rochmat Soemitro: 1983, hal 235).

4.2.2. Tujuan dan Manfaat Retribusi Daerah

Sebagai salah satu dari instrumen pajak, maka retribusi mempunyai manfaat banyak terutama bagi pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan pembangunan daerah. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Retribusi dapat meningkatkan kemampuan dalam pembiayaan PAD
2. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Tujuan retribusi daerah adalah agar retribusi dapat berfungsi secara efisien dan efektif, maka tidak harus diperhitungkan secara ekonomis, fisik dan aparat pemerintah yang menangani retribusi yang cukup banyak saja, akan tetapi harus ada kesadaran dan peran aktif yang cukup tinggi dari masing-masing orang atau masyarakat sebagai wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pembayaran retribusi atas jasa yang telah digunakan.

4.2.3. Unsur-Unsur dan Sifat-Sifat Retribusi Daerah

Bedasarkan beberapa definisi retribusi, maka dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dan sifat retribusi.

1. Unsur-unsur retribusi antara lain:

- a. Ada masyarakat
- b. Ada undang-undang
- c. Ada pemungut retribusi
- d. Ada subyek atau wajib retribusi
- e. Ada obyek retribusi
- f. Ada surat ketetapan retribusi

2. Sifat retribusi adalah:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar
- c. Walaupun memenuhi persyaratan formal dan materi, tetapi ada alternatif untuk mau tidak mau membayar
- d. Merupakan pungutan pada umumnya sifat budgeternya tidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

4.3. Retribusi Parkir

4.3.1. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi Parkir merupakan pungutan untuk setiap kendaraan bermotor ataupun yang menggunakan jasa tempat parkir. Pengenaan retribusi parkir ini berlaku untuk setiap kali parkir artinya jika kendaraan bermotor pindah dari tempat yang satu kemudian menggunakan jasa tempat parkir yang lain, maka ditempat yang baru tersebut dikenakan retribusi parkir yang baru pula. Jadi setiap kali, bagi setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir dikenakan retribusi didalam uraian pendapatan pemerintah daerah, retribusi parkir dimasukkan pada posisi retribusi parkir sehingga pendapatan dari bea parkir, selain penerimaan dari bea parkir pemerintah daerah khususnya Dipenda yang diberikan wewenang untuk mengurus hal ini memperoleh penerimaan dari dinas-dinas sebagai titipan kendaraan.

Perbedaan retribusi parkir dengan usaha titipan kendaraan ialah bahwa dalam retribusi parkir areal yang digunakan adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah bukan milik perorangan atau badan usaha. Retribusi Parkir didaerah Kotamadya dipungut pada setiap kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir diwilayah daerah Kotamadya diatur dalam keputusan Walikota Yogyakarta.

4.3.2. Dasar Hukum Penerapan Retribusi parkir

Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial ini dalam penyelenggaraannya berlandaskan pada :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Pengendaraan Bermotor di jalan.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/Hk/05/DRJD/1996 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan fasilitas parkir.
- e. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 1994.

Retribusi parkir di Kota Yogyakarta di pungut pada setiap kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir di wilayah Kota Yogyakarta diatur dalam keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 19 Tahun 2002, sedangkan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Ketentuan umum perparkiran menurut pasal 1 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaran yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

4.3.3. Tarif Retribusi Parkir

Tarif Retribusi Parkir adalah sejumlah dana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dikenakan pada wajib parkir, sedangkan yang dimaksud dengan wajib parkir adalah seseorang yang memarkirkan kendaraan pada areal perparkiran.

Besarnya biaya parkir untuk setiap kali parkir ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

KAWASAN PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF PER SEKALI PARKIR
Kawasan Khusus	-Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 10.000,-
	- Truk Besar	Rp. 8.500,-
	- Bus besar	Rp. 8.000,-
	- Truk sedang	Rp. 7000,-
	- Bus sedang	Rp. 6.500,-
	- Sedan, jeep, pick up, station wagon	Rp. 1.500,-
	- Sepeda motor	Rp. 500,-
	- Sepeda	Rp. 200,-

Kawasan I	<ul style="list-style-type: none"> - Truk gandengan, sumbu III atau lebih - Truk Besar - Bus besar - Truk sedang - Bus sedang - Sedan, jeep, pick up, station wagon - Sepeda motor - Sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 8.500,- Rp. 7.000,- Rp. 6.500,- Rp. 5.500,- Rp. 5.000,- Rp. 1.000,- Rp. 4.00,- Rp. 100,-
Kawasan II	<ul style="list-style-type: none"> - Truk gandengan, sumbu III atau lebih - Truk Besar - Bus besar - Truk sedang - Bus sedang - Sedan, jeep, pick up, station wagon - Sepeda motor - Sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 7.000,- Rp. 5.500,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.500,- Rp. 800,- Rp. 300,- Rp. 100,-
Kawasan III	<ul style="list-style-type: none"> - Truk gandengan, sumbu III atau lebih - Truk Besar - Bus besar - Truk sedang - Bus sedang - Sedan, jeep, pick up, station wagon - Sepeda motor - Sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.500,- Rp. 4.000,- Rp. 3.500,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 500,- Rp. 200,- Rp. 100,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keputusan Walikota Nomor 67 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 8 ayat (2) berikut.

Tabel 4.2.
Pembagian Kawasan dan Jalan
Di Kota Yogyakarta

Kawasan Khusus	Kawasan I
Jl. Malioboro Jl. A. Yani Jl. Pasar Kembang Jl. Sosrowijayan Jl. Perwakilan Jl. Dagen Jl. Suryatmajan Jl. Pajeksan Jl. Ketandan Jl. Beskalan Jl. Reksobayan Jl. Pabringan Jl. Sriwedani Jl. P. Senopati Jl. Urip Sumoharjo Jl. Prof. Yohanes Jl. Dr. Wahidin (utara S.4 Duta Wacana)	Jl. Adisucipto Jl. Sudirman Jl. Diponegoro Jl. Magelang Jl. K11. A Dahlan Jl. Kusumanegara Jl. Sultan Agung Jl. Mangkubumi Jl. Mataram Jl. Bhayangkara Jl. Jogonegaran Jl. Gandekan Lor
Kawasan II	Kawasan III
Jl. Parantritis Jl. B. Katamso Jl. C. Simanjutak Jl. Gejayan Jl. Dr. Sutomo Jl. Dr. Wahidin (selatan S.4 Duta Wacana) Jl. Hayamwuruk Jl. Gajahmada Jl. Mondorokan Jl. Jl. Bantul	Selain jalan pada kawasan khusus, kawasan I, kawasan II

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Tentang Tarif Retribusi untuk parkir yang berlangganan pada pasal 8 ayat

(3) sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Tarif Retribusi Untuk Parkir Berlangganan
Di Kota Yogyakarta

JENIS KENDARAAN	TARIP PARKIR PER BULAN PER KENDARAAN
- Sedan, station wagon, taxi, mobil barang, mobil penumpang	Rp. 250.000,-
- Andong	Rp. 5.000,-
- Becak	Rp. 3.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Tarif Retribusi untuk parkir kendaraan di badan jalan yang mengubah fungsi jalan sebagai garasi pada pasal 8 ayat (4) adalah.

Tabel 4.4.
Tarif Parkir di Badan Jalan
Kota Yogyakarta

JENIS KENDARAAN	TARIP PARKIR PER BULAN PER KENDARAAN
- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 250.000,-
- Truk / bus besar	Rp. 200.000,-
- Truk / bus sedang	Rp. 150.000,-
- Sedan, station wagon, mobil barang, mobil penumpang	Rp. 100.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

4.3.4. Penerimaan Retribusi Parkir

Di Kabupaten atau Kota retribusi daerah memiliki peranan terbesar kedua didalam memberikan penerimaan bagi pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Walaupun macam-macam retribusi daerah biasanya berbeda-beda, tetapi daerah tersebut pasti mempunyai pos-pos retribusi daerah andalan yang sesuai dengan keadaan daerahnya.

Kebanyakan di kota-kota besar yang berpenduduk padat, retribusi parkir dijadikan salah satu andalan karena biasanya memberikan penerimaan yang besar bagi penerimaan daerah. Tentunya keberadaan retribusi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, masyarakat yang telah mengeluarkan dananya untuk membayar retribusi parkir pun tidak dirugikan karena ia telah menggunakan fasilitas berupa pelayanan dan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah agar kendaraan yang diparkirnya terjaga sementara ia menjalankan aktivitasnya

4.3.5. Perkembangan Retribusi Parkir

Penerimaan retribusi parkir diharapkan terus berkembang dari tahun ketahun, mengingat retribusi ini cukup potensial memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat membiayai pembangunan daerah sekaligus pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengadakan pengelolaan dan pembinaan tentang parkir yang dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir.

Namun demikian perkembangan retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah saja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan retribusi parkir adalah:

1. Kesadaran Masyarakat Umum

Kesadaran dari masyarakat untuk memarkirkan kendaraan yang digunakannya di tempat-tempat yang telah disediakan serta membayar tarif retribusi yang telah ditentukan.

2. Kesadaran Para Juru Parkir

Kesadaran para juru parkir untuk mentaati segala ketentuan didalam penarikan retribusi parkir bersikap jujur dalam menyetor hasil pendapatannya.

3. Meningkatnya Jumlah Kendaraan, Khususnya Kendaraan Pribadi

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Retribusi parkir perlu digali dan ditingkatkan, sehingga penerimaan dari retribusi parkir semakin besar dari waktu ke waktu dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Kuantitatif

Metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dinyatakan dengan jelas atau menggunakan formula yang pasti untuk mengetahui sampai dimana pungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai efektif dan efisien.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian digunakan data sekunder antara lain:

1. Biro Pusat Statistik Kota Yogyakarta
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta
3. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Data tahunan ini antara lain " Kota Yogyakarta Dalam Angka " yang diterbitkan oleh BPS bekerjasama dengan Bappeda Kota Yogyakarta dari beberapa tahun dimulai dari tahun 1998 – 2002, data –data dari BPKD, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun dimulai dari 1998 – 2002.

4.3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, maka sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai Kontribusi, Elastisitas, Efektifitas dan Efisien di Kota Yogyakarta, maka pembahasan bentuk formula dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD

Untuk mengetahui peranan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi parkir dengan pencapaian atau realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000;17) atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum RP}{\sum PAD} \times 100\%$$

Keterangan :

- K : Kontribusi
- ΣRP : Retribusi Parkir
- ΣPAD : Pendapatan Asli Daerah

2. Elastisitas

Untuk perhitungan elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi parkir yang menyebabkan perubahan penerimaan dari PAD. Untuk menghitung elastisitas ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum RP = \left| \frac{\Delta PAD}{\Delta RP} \right| \times \frac{RP}{PAD}$$

Dimana :

- ΣRP = Elastisitas Retribusi Parkir
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- RP = Retribusi Parkir
- ΔPAD = Perubahan Pendapatan Asli Daerah
- ΔRP = Perubahan Retribusi Parkir

3. Hasil Guna (Efektifitas)

Pengukuran efektifitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Bahwa efektifitas berkaitan hanya dengan output (target) dan yang lebih penting adalah bahwa derajat dari efektifitas sama sekali bukan tentang seberapa banyak yang dihasilkan untuk mencapai sasaran atau target (output) tersebut, Efektifitas (Devas dkk)1989 hal 143 diukur sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Outcome}{Output}$$

Diformulasikan untuk mengukur seberapa besar efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$Efektifitas = \frac{RealisasiPenerimaanRetribusiParkir}{TargetRetribusiParkir} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektifitas, apabila hasilnya menunjukkan prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi parkir semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil prosentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi parkir semakin tidak efektif.

4. Daya Guna (Efisiensi)

Efisiensi biaya atau pengeluaran dapat diartikan sebagai efisiensi yang ukuran masuknya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluaran efisiensi dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat pemanfaatan suatu biaya atau pengeluaran dan juga merupakan informasi yang sangat diperlukan dalam menghendaki bahwa untuk sejumlah pengeluaran tertentu diperoleh manfaat atau hasil (keluaran) yang sebesar-besarnya atau sejumlah manfaat tertentu dikorbankan sedikit mungkin pengeluaran. Dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Total Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Retribusi Parkir}} /$$

Dasar penilaian efisiensi adalah apabila tingkat efisiensi dibawah 100 persen adalah efisien dan diatas 100 persen adalah tidak efisien semakin kecil nilai efisien maka semakin tinggi tingkat efisiensi (Soetrisno, Ph) 1988 hal 2.5 – 2.6.

BAB VI
ANALISA DATA

6.1. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Retribusi Parkir dalam meningkatkan PAD, maka menggunakan rumus kontribusi yang merupakan rasio antara jumlah retribusi parkir dengan PAD dikali 100%. Berdasarkan hasil perhitungan apabila dalam perhitungan nilai Kontribusi (K) semakin besar atau >100%, maka menunjukkan peranan retribusi parkir terhadap PAD semakin besar. Besarnya kontribusi retribusi parkir untuk tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1998/1999	557.541.800	19.972.865.793	2.79
1999/2000	515.091.100	24.790.128.183	2.07
2000/2001	414.313.150	22.452.952.250	1.85
2001/2002	889.158.800	24.346.027.640	3.65
2002	586.297.630	56.391.374.292	1.04
Jumlah	2.962.402.489	147.953.348.200	11.4
Rata-Rata	592.480.496	29.590.669.640	2.28

Sumber: Diolah dari data BPKD Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 6.1. diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD selama tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun

anggaran 2002 memberikan kontribusi antara 1,04% sampai dengan 3,65%. Kontribusi tertinggi di capai pada tahun anggaran 2001/2002 sebesar 3,65% dan kontribusi terendah pada tahun anggaran 2002 sebesar 1,04%, sehingga rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 2,28% per tahun.

Pada tahun anggaran 1998/1999 menunjukkan kontribusi, hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran tersebut diadakan pembukaan lahan baru untuk tempat parkir di tepi jalan umum, sehingga penerimaan retribusi parkir menjadi lebih meningkat (menurut Kepala BPKD). Persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD pada tahun anggaran 1999/2000 – 2000/2001 menunjukkan kontribusi retribusi parkir di bawah rata-rata, hal ini disebabkan adanya kecurangan di lapangan oleh juru parkir karena menggunakan kupon parkir berkali-kali yang sudah kadaluarsa atau yang sudah di sobek dari segel kupon karcis (menurut Kepala UPTD).

Pada tahun anggaran 2001/2002 kontribusi retribusi parkir menunjukkan diatas rata-rata yaitu sebesar 3,65%, hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang insentif dari Dinas Perhubungan atau UPTD terhadap juru parkir dilapangan. Pada tahun anggaran 2002 kontribusi retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 2,61% dari 3,65% menjadi 1,04%, hal ini disebabkan karna adanya perubahan Perda pada tahun tersebut, dari Perda no.10 tahun 1994 di ganti dengan Perda no.19 tahun 2002. Secara rata-rata retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,28% per tahun, dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Kota atau Kabupaten antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas dapat dilihat di bawah ini:

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 memberikan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 2,80%, sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 2,28%. Pada tahun anggaran 1992/1993--1996/1997 belum terkena krisis moneter sehingga kontribusinya meningkat jika dilihat pada tahun anggaran 1998/1999--2002 sudah mengalami krisis yang multidimensi sehingga mengakibatkan kontribusi retribusi terhadap PAD mengalami penurunan dan daya beli masyarakat rendah. Selain hal tersebut banyaknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para juru parkir meskipun peraturan di lapangan sudah di perketat oleh Unit Pengelolaan Tehnis Dinas (menurut Kepala UPTD).

2. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten dalam nilai Kontribusi Retribusi Parkir selama 11 tahun dari tahun 1990/1991 – 2000 mencapai 11,22%, hal ini berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta dimana Kontribusi Retribusi Parkir dalam 5 tahun dari tahun 1998/1999 – 2002 mencapai 2,28. bahwa Kabupaten Klaten mengambil kurun waktu 11 tahun dan Kota Yogyakarta

5 tahun, tetapi Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah yang cukup besar dan penduduk yang cukup padat pula.

3. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas dalam nilai Kontribusi Retribusi Parkir selama 10 tahun dari tahun tahun 1989/1990 – 1998/1999 mencapai 0,59%, hal ini berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta dimana Kontribusi Retribusi Parkir selama 5 tahun dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 mencapai 2,28%, hal ini di karenakan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang cukup padat penduduk dan kendaraan bermotor. Di lihat dari tahun 1989/1990 – 1998/1999 nilai kontribusi retribusi parkir menurun atau tidak mencapai 1%, sedangkan di Kota Yogyakarta diatas 1%.

6.2. Elastisitas Retribusi Parkir

Untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), koefisien elastisitas lebih dari satu maka *elastis*, kalau sama dengan satu disebut *unitary elastis*, apabila kurang dari satu disebut *inelastis*. Hasil perhitungan elastisitas retribusi parkir terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut.

Tabel 6.2.
Elastisitas Retribusi Parkir Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun	Realisasi RP	Realisasi PAD	Perubahan RP	Perubahan PAD	Elastisitas (%)
1998/1999	557.541.800	19.972.865.793	925.800	818.215.500	24.67
1999/2000	515.091.100	24.790.128.183	42.450.700	4.817.262.390	2.36
2000/2001	414.313.150	22.452.952.250	100.777.950	2.337.175.930	0.43
2001/2002	889.158.800	24.346.027.640	474.845.650	1.893.075.390	0.15
2002	586.297.630	56.391.374.292	302.861.170	32.045.346.650	1.10
Jumlah	2.962.402.480	147.953.348.200	921.861.270	41.911.075.860	28.71
Rata-Rata	592.480.496	29.590.669.640	184.372.254	8.382.215.172	5.74

Sumber: Data diolah dari BPKD Kota Yogyakarta

Dari perhitungan elastisitas penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD diatas menunjukkan bahwa angka elastisitas berkisar antara 0,15% sampai dengan 24,67% dan bila dilihat tingkat elastisitas retribusi parkir rata-rata elastis yaitu sebesar 5,74%. Pada tahun 1998/1999 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 24,67% berarti lebih dari satu atau disebut elastis, artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 24,67%, hal ini dikarenakan bahwa jumlah perubahan retribusi parkir sangat kecil sekali. Pada tahun 1999/2000 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 2,36% berarti lebih dari satu atau elastis, artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 2,36%.

Pada tahun 2000/2001 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,43% berarti kurang dari satu atau inelastis, artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,43%. Pada tahun 2001/2002 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,28% yaitu dari 0,43 menjadi 0,15% berarti kurang dari satu atau inelastis, artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,15%. pada tahun 2002 elastisitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,10% berarti lebih dari satu atau elastis, artinya apabila penerimaan retribusi parkir berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 1,10%, bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta sebesar 5,74% dari retribusi parkir.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Kota atau Kabupaten dapat dilihat di bawah ini:

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 nilai elastisitasnya atau kepekaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,13%, hal ini berbanding terbalik pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002/2003 nilai elastisitas mencapai 5,74%, hal tersebut menunjukkan kepekaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Pada tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 terdapat nilai yang tidak elastis atau tidak peka terhadap PAD yaitu pada tahun 1993/1994 dan 1996/1997 yang

nilainya sebesar 0,27% dan 0,83% sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999-2002/2003 terdapat dua tahun yang nilainya tidak elastis yakni pada tahun anggaran 2000/2001 dan 2001/2002 sebesar 0,43% dan 0,15%, hal ini dikarenakan bahwa pada tahun anggaran 2000/2001 hanya di perhitungkan 9 bulan dan pada tahun anggaran 2001/2002 dalam pertengahan anggaran terjadi pergantian wewenang dari Dinas Pendapatan ke Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut.

2. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas dalam nilai elastisitas atau kepekaan terhadap PAD selama 10 tahun dari tahun 1989/1990-1998/1999 mencapai -3,26%, hal ini berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta dimana nilai elastisitas atau kepekaan terhadap PAD mencapai 5,74%, hal ini di karenakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai luas wilayah yang cukup dan penduduk yang cukup padat pula di tambah dengan masyarakat pendatang yang bertujuan menuntut ilmu. Kabupaten Banyumas terdapat tiga tahun mencapai nilai negatif yakni tahun 1993/1994 sebesar -16,02%, tahun 1997/1998 sebesar -45,18% dan tahun 1998/1999 sebesar -4,37%, akan tetapi bersifat elastis atau peka terhadap PAD sedangkan di Kota Yogyakarta selama 5 tahun dari tahun 1998/1999-2002 tidak ada nilainya yang negatif akan tetapi terdapat dua tahun yang nilainya tidak elastis yaitu pada tahun 2000/2001 dan 2001/2002 masing-masing sebesar 0,43% dan 0,15%. Kabupaten Banyumas terdapat tiga tahun yang nilainya tidak

elastis yakni tahun 1989/1990,1992/1993 dan 1995/1996 yang masing-masing nilainya sebesar 0,43%,0,46% dan 0,97%.

6.3. Efektifitas Retribusi Parkir terhadap PAD

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dilakukan dengan mengukur realisasi penerimaan retribusi parkir dengan besarnya target retribusi parkir yang telah ditetapkan dan dikali 100%. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih besar atau >100% maka pengelolaan retribusi parkir dinilai efektif begitu pula sebaliknya.adapun hasil perhitungan efektifitas dapat dilihat pada tabel 6.3. berikut:

Tabel 6.3.
Efektifitas Retribusi Parkir terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun	Efektifitas
1998/1999	104.82
1999/2000	104.65
2000/2001	104.39
2001/2002	153.31
2002	90.89
Jumlah	555.06
Rata-Rata	111.02

Sumber: Data diolah dari BPKD

Dari hasil perhitungan pada tabel 6.3. diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap PAD rata-rata dinilai efektif sebesar 111,02% per tahun atau dengan kata lain realisasi penerimaan retribusi parker 11,02% lebih besar dari target, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam

mengelola penerimaan retribusi parkir dengan efektif. Ketidakefektifan terjadi pada tahun anggaran 2002 mencapai sebesar 90,89%, hal ini disebabkan karena adanya perubahan Perda, dari Perda no.10 tahun 1994 di ganti dengan Perda no.19 tahun 2002 sehingga ini membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan ke lapangan atau juru parkir. Pada tahun anggaran 1998/1999-2001/2002 efektifitasnya cukup tinggi di karenakan realisasi penerimaan retribusi parkir lebih besar dari target penerimaan retribusi parkir.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Kota atau Kabupaten antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Banyumas dapat dilihat di bawah ini:

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 memberikan nilai efektifitas retribusi parkir selama 5 tahun mencapai 100,91%, nilai ini berbeda jauh dengan nilai efektifitas retribusi parkir pada tahun anggaran 1998/1999-2002 yang mencapai 111,02%, terdapat satu tahun anggaran yang belum mencapai target yaitu pada tahun anggaran 2002 yang nilainya sebesar 90,89% namun di tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 terdapat dua tahun anggaran yang belum mencapai target yaitu tahun anggaran 1992/1993 dan 1995/1996 masing-masing nilainya sebesar 98,73% dan 96,35%, ini dikarenakan pada tahun tersebut adanya pergantian perda sehingga didalam mensosialisasikan dan adaptasi ke lapangan atau tehnisnya membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar sekali.

2. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten dalam nilai efektifitas retribusi parkir selama 11 tahun dari tahun 1990/1991-2000 mencapai 104,059%, nilai ini berbeda jauh dengan nilai efektifitas retribusi parkir Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1998/1999-2002 yang mencapai nilai sebesar 111,02%, nilai ini telah termasuk mencapai target walaupun di tahun anggaran 2002 tidak mencapai target sebesar 90,89% tapi secara rata-rata sudah mencapai efektif. Kabupaten Klaten nilai efektifitasnya masih dibawah 6,97% dari Kota Yogyakarta, terdapat 2 tahun anggaran yang belum mencapai target yaitu pada tahun anggaran 1991/1992 dan 1998/1999 yang nilainya hanya mencapai 92,1% dan 99,6%.

3. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas dalam nilai efektifitas retribusi parkir selama 10 tahun dari tahun 1989/1999-1998/1999 mencapai 107,81%, nilai ini tidak jauh berbeda dengan nilai efektifitas retribusi parkir Kota Yogyakarta selama 5 tahun dari tahun 1998/1999-2002 yang nilainya mencapai 111,02%, nilai efektifitas ini sudah termasuk mencapai target walaupun di tahun terakhir yaitu tahun 2002 tidak mencapai target. Kabupaten Banyumas nilai efektifitas masih dibawah Kota Yogyakarta sebesar 3,21%, terdapat dua tahun anggaran yang belum mencapai target atau nilai efektif yaitu pada tahun anggaran 1997/1998 dan 1998/1999 hanya mencapai nilai 99,24% dan 92,65%.

6.4. Efisiensi Retribusi Parkir terhadap PAD

Perhitungan nilai efisien retribusi parkir di gunakan untuk menilai penerimaan retribusi parkir yang di pakai untuk menutup biaya pemungutan retribusi parkir tersebut, dengan kata lain efisiensi retribusi parkir berhubungan dengan biaya yang di perlukan untuk memungut retribusi parkir. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih kecil atau <100% maka pengelolaan retribusi parkir dinilai efisien begitu sebaliknya. Jenis-jenis biaya retribusi parkir yang dibutuhkan selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 6.4. dibawah ini:

Tabel 6.4.
Jenis-Jenis Biaya Retribusi Parkir
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Jenis-jenis Biaya			Total Biaya
	Gaji	Sarana/prasarana	Insentif	
1998/1999	126.000.000	30.400.000	22.877.090	184.277.090
1999/2000	131.040.000	40.100.000	28.754.556	199.894.555
2000/2001	151.200.000	44.050.000	20.715.627	215.965.657
2001/2002	162.000.000	44.050.000	44.457.940	250.507.940
2002	183.600.000	53.196.667	29.314.881	266.111.556

Sumber: BPKD dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Perhitungan efisiensi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disajikan pada tabel 6.5. berikut ini.

Tabel 6.5.
Efisiensi Retribusi Parkir terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun	Efisiensi (%)
1998/1999	31.90
1999/2000	38.80
2000/2001	52.13
2001/2002	28.17
2002	45.38
Jumlah	196.38
Rata-Rata	39.27

Sumber: Data diolah dari BPKD dan Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6.5. diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rata-rata cukup efisien yaitu sebesar 39,27%, dengan hasil tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam mengelola penerimaan retribusi parkir secara efisien. Tingkat efisiensi dari tahun anggaran 1998/1999-2002 secara umum meningkat di karenakan penerimaan realisasi retribusi parkir mengalami kenaikan sehingga bisa menutupi biaya pemungutan retribusi parkir.

Pengamatan data sebagai bahan pertimbangan antar Kota atau Kabupaten antara lain Kota Yogyakarta dapat dilihat dibawah ini.

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dalam nilai efisiensi rata-rata dari tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan 1996/1997 mencapai nilai 31,44%, nilai ini berbeda jauh dengan nilai efisiensi pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 mencapai nilai 39,27%, dilihat nilai pada tahun anggaran 1998/1999-2002 mengalami penurunan sebesar 7,83% dari 31,44% pada tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 atau bias dikatakan bahwa biaya pemungutan pada tahun tersebut tidak terlalu besar, hal ini disebabkan adanya perbedaan tahun dan biaya-biaya yang digunakan untuk pemungutan pada tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 masih belum terlalu maksimal. Pada tahun anggaran 1998/1999-2000/2001 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena mengalami suatu krisis multidemensi yang cukup panjang sehingga daya beli masyarakat sangat rendah dan meningkatnya biaya-biaya operasional yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2001/2002 nilai efisiensi mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 23,96% dari 52,13% pada tahun 2000 menjadi 28,17%, ini disebabkan bahwa pada tahun tersebut nilai realisasi retribusi parkir sangat besar dan melebihi target yang ditetapkan, meskipun biaya-biaya operasional yang dibutuhkan meningkat. Pada tahun anggaran 2002 mengalami penurunan nilai efisiensinya sebesar 17,21% dari 28,17% menjadi 45,38%, hal ini disebabkan pada tahun tersebut realisasi retribusi parkir tidak mencapai target karena banyaknya kendala di lapangan seperti adaptasi dan sosialisasi perda yang baru dan banyaknya kecurangan di lapangan (menurut Kepala

UPTD), meskipun dapat menutupi total biaya operasional yang dibutuhkan. Berbeda dengan tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 nilai efisiensi meningkat atau signifikan, ini dikarenakan bahwa pada tahun anggaran tersebut belum terkena krisis moneter daya beli masyarakat masih tinggi dan bergairah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dianalisis oleh penulis maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta memang telah menjadi kota pelajar sejak lama dengan bergulirnya waktu terlihat ada banyak perubahan di Kota Yogyakarta, dampak yang nyata adalah banyaknya para pelajar dan mahasiswa menuntut ilmu di kota tersebut, untuk mendukung kegiatan dari para pelajar dan mahasiswa tersebut digunakan sepeda motor dan mobil yang fungsinya memang sederhana dan berguna, data menunjukkan bahwa Kontribusi dari Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta rata-rata mencapai 2,28% selama periode pengamatan. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta memang kecil akan tetapi berpotensi untuk terus di gali secara maksimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Pengamatan terhadap penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1998/1999-2002 secara rata-rata di nilai elastis atau peka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,74%. Pada tahun 2000 dan 2001 dinilai tidak elastis karna adanya Kecurangan di

lapangan oleh juru parkir seperti kupon yang sudah di robek dari segelnya di gunakan lagi, selain itu kesadaran dari masyarakat masih kurang.

3. Pengamatan terhadap penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 1998/1999-2002 secara rata-rata efektif. Pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 tingkat efektifitas telah mencapai target, namun pada tahun anggaran 2002 belum mencapai target karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor semakin banyak terjadinya kecurangan di lapangan yang di lakukan oleh juru parkir seperti karcis yang sudah dirobek dari segelnya masih digunakan untuk karcis parkir, selain itu bentuk kesadaran masyarakat terhadap karcis masih kurang peduli. Namun dalam mengintrepertasikan harus dengan hati-hati karna bisa saja untuk mencapai efektifitas target yang dicanangkan tidak sesuai dengan potensi yang ada di teknisnya.
4. Pengamatan terhadap efisiensi pemungutan Retribusi Parkir menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1998/1999-2002 terjadi peningkatan efisiensi yang di tunjukkan dengan naiknya nilai rasio atau realisasi penerimaan (output) terhadap biaya pemungutan, nilai efisiensi pemungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama periode 1998/1999-2002 rata-rata sebesar 39,27%, nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat

menghasilkan penerimaan retribusi parkir sebesar 39,27%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam mengelola penerimaan retribusi parkir secara efisien dan dapat menutup biaya pemungutan retribusi parkir yang dikeluarkan oleh Unit Pengelolaan Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

7.2. Saran

1. Penerimaan Sektor Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta lebih berperan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat di gali potensi yang ada secara maksimal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap parkir sehingga realisasi dan pelaksanaannya dapat terlihat dengan jelas
2. Pemungutan Retribusi Parkir diharapkan dapat terus berjalan sesuai keinginan para pengguna parkir dengan konsekuensi ada timbal balik terhadap masyarakat maupun terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta, dan meningkatkan pelayanan dan keamanan di tempat perparkiran.
3. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan target Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta perlu di lakukan penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan kondisi perekonomian.
4. Penulis berharap untuk dapat melakukan penertiban oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kecurangan yang di lakukan oleh para juru

parkir dilapangan dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erick Marselin P, "*Peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas*", UPN "VETERAN", Yogyakarta, 2001
- Endah Setyaningsih, "*Peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Yogyakarta*", UPN "VETERAN", Yogyakarta, 2001
- Indah Rosepita Dewi, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Parkir dan Peranannya terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten*", UPN "VETERAN" Yogyakarta, 2002
- Mardiasmo dan Makhfatih, "*Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*", Modul Pelatihan: PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2000
- Mardiasmo, "*Perpajakan*", PT. Eresco, Bandung, 1987
- Nick Devas Dkk, "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*", Cetakan Pertama, UI, 1989
- Rochmat Soemitro, "*Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintah Daerah*", PT. Eresco Tarate, Bandung, 1983
- Soetrino PH, "*Perbandingan Sistem Ekonomi*", Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988

LAMPIRAN

1. Perhitungan Kontribusi

$$K = \frac{\sum \text{Retribusi Parkir}}{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 1998

$$\frac{557.541.800}{19.972.865.793} \times 100\% = 2,79 \%$$

Tahun 1999

$$\frac{515.091.100}{24.790.128.183} \times 100\% = 2,07 \%$$

Tahun 2000

$$\frac{414.313.150}{22.452.952.250} \times 100\% = 1,85 \%$$

Tahun 2001

$$\frac{889.158.800}{24.345.027.640} \times 100\% = 3,65 \%$$

Tahun 2002

$$\frac{586.297.630}{56.391.374.292} \times 100\% = 1,04 \%$$

2. Perhitungan Elastisitas

$$\sum_{RP} = \frac{\Delta PAD}{\Delta RP} \times \frac{RP}{PAD}$$

Mencari perubahan Retribusi Parkir (ΔRP)

ΔRP = Realisasi RP tahun sekarang – Realisasi RP tahun sebelumnya

Tahun 1998 = 557.541.800 – 558.467.600 = 925.800

Tahun 1999 = 515.091.100 – 557.541.800 = 42.450.700

Tahun 2000 = 414.313.150 – 515.091.100 = 100.777.950

Tahun 2001 = 889.158.800 – 414.313.150 = 474.845.650

Tahun 2002 = 586.297.630 – 889.158.800 = 302.861.170

Mencari perubahan Pendapatan Asli Daerah (ΔPAD)

ΔPAD = Realisasi PAD tahun sekarang – Realisasi PAD tahun sebelumnya

Tahun 1998 = 19.972.865.793 – 19.154.650.290 = 818.215.500

Tahun 1999 = 24.790.128.183 – 19.972.865.793 = 4.817.262.390

Tahun 2000 = 22.452.952.250 – 24.790.128.183 = 2.337.175.950

Tahun 2001 = 24.346.027.640 – 22.452.952.250 = 1.893.075.390

Tahun 2002 = 56.391.374.292 – 24.346.027.640 = 32.045.346.650

Tahun 1998

$$\frac{818.215.500}{925.800} \times \frac{557.091.800}{19.972.865.793} = 24.67 \%$$

Tahun 1999

$$\frac{4.817.262.390}{42.450.700} \times \frac{515.091.100}{24.790.128.183} = 2.36 \%$$

Tahun 2000

$$\frac{2.337.175.930}{100.777.950} \times \frac{414.313.150}{22.452.952.250} = 0.43 \%$$

Tahun 2001

$$\frac{1.893.075.390}{474.845.650} \times \frac{889.158.800}{24.346.027.640} = 0.15 \%$$

Tahun 2002

$$\frac{32.045.346.650}{302.861.170} \times \frac{586.297.630}{56.391.374292} = 1.10 \%$$

3. Perhitungan Efektifitas

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Tahun 1998

$$\frac{557.541.800}{551.016.500} \times 100\% = 104,82\%$$

Tahun 1999

$$\frac{515.019.100}{506.702.720} \times 100\% = 101,65\%$$

Tahun 2000

$$\frac{414.313.150}{396.870.350} \times 100\% = 104,39\%$$

Tahun 2001

$$\frac{889.158.800}{580.000.000} \times 100\% = 153,31\%$$

Tahun 2002

$$\frac{586.297.630}{645.000.000} \times 100\% = 90,89\%$$

4. Perhitungan Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya total pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Tahun 1998

$$\frac{184.277.090}{577.541.800} \times 100\% = 31.90\%$$

Tahun 1999

$$\frac{199.894.555}{515.091.100} \times 100\% = 38.80\%$$

Tahun 2000

$$\frac{215.965.657}{414.313.150} \times 100\% = 52.13\%$$

Tahun 2001

$$\frac{250.507.940}{889.158.800} \times 100\% = 28.17\%$$

Tahun 2002

$$\frac{266.111.556}{586.297.630} \times 100\% = 45.38\%$$



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@ptasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/01

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekn. - UII Yogyakarta No. 1340/DEK/10/Bag.UM/1/2004
Tanggal : 07-01-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :
N a m a : HERIMANSYAH No. Mhs./NIM : 99 313 204
Alamat Instansi : Condong catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul : PERANAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
YOGYAKARTA STUDI KASUS 1992 - 2002

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 09 Januari 2004 s/d 09 April 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
4. Dekan Fak. Ekn. - UII Yogyakarta;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 09 Januari 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

SURAT PERIZINAN / IZIN

Nomor : 0701/0056

Dasar : Surat perintah/mandasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0701/104 Tanggal 20 Januari 2004

Mengingat : Keputusan Walikota Istimewa Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/PP/1986 Tanggal 30 Mei 1986 tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/2001 tentang Penetapan Tata-tata-sana Pemerintahan Kota Bagi setiap instansi Pemerintahan maupun Non Pemerintahan yang melakukan Pendataan/penelitian

Diizinkan kepada : Nama : Hermansyah NIM 990313204
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kehutanan UII
Alamat : CC Depok, Sleman
Pencapaian gelar : Dsr. Agus Widjajono, MA
Kegiatan : Melakukan penelitian dengan judul : PERANAN REKREASI PARKIR TERHADAP BERKUALITAS ASLI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA STUDI KASUS 1982-2002

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : Mulai pada tanggal 01 Januari 2004 sampai 07 April 2004

Lampiran : Lembar izin dari Responden

Dengan ketentuan :
1. Melaksanakan kegiatan sesuai prosedur penelitian. Laporan penelitian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
2. Wajib menjaga data, tempat dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Tidak dibekali disampingkan untuk tujuan penelitian yang dapat membahayakan keselamatan, kenyamanan dan upaya pembangunan untuk kepedulian bangsa.
4. Seluruh data ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipertuhannya keselamatan, kenyamanan dan hal diatas.

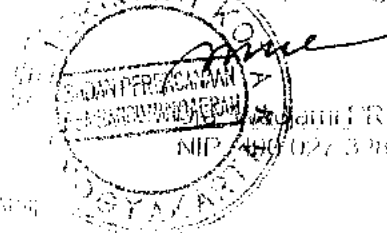
Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintahan setempat dapat membeti hal-hal sehubungan dengan ini.

Dieluarkan di Yogyakarta
Tgl. tanggal 13-01-2004

Danda Lingsih
Pemegang Izin

Hermansyah

An Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Uls. Kabid. Data, Litbang & KAD



Tembusan Kepada:

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linnas- Kota Yk
4. Ka. KPMD Kota Yogyakarta
5. Ka. Dinas Pembangunan Kota Yogyakarta
6. Ka. DPRD Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Magelang No. 41 Telp. (0274), 561787
YOGYAKARTA

Kode Pos 55242

SURAT IJIN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 070/262/2004

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


- Dasar :
- Surat Keterangan Ijin dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/104 tanggal 9 Januari 2004.
 - Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 072/KD/1986, tentang: Petunjuk Pelaksanaan Terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 33/KPTS/1996 tentang Tataaksana Pemberian Ijin bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang Melakukan Pendataan / Penelitian.
 - Surat Keterangan / Ijin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 070/0056 tanggal 13 Januari 2004

MENGHINKAN :

Kepada : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
Nama : HERMANSYAH, NIM. 20313204.
Alamat : Depok, Sleman, Yogyakarta.
Untuk : mengadakan penelitian dengan judul: "Peranan Kontribusi Parkir Terhadap PAD Kota Yogyakarta." di UPTD Pengelolaan Pemarkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Januari 2004

An. KEPALA DINAS
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DIB. KASUB. BAG. PENGENDALIAN & EVALUASI



SITI NOER ISTIKOMAH, ST
NIP. 190 030 415

- Lampusan :
- Ka. UPTD Pengelolaan Pemarkiran.
 - Arsip.